



**STRATEGI IMPLEMENTASI *CONTINUOUS AUDITING* DI
INSPEKTORAT DAERAH**

(Studi Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo)

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Manajemen**

Oleh:

Deni Yuliono
NPM: 22102081008



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

PASCASARJANA

MALANG

2023

ABSTRAK

Penelitian ini menyandingkan permasalahan kurang optimanya *early warning system* terhadap praktik korupsi dengan potensi keunggulan *Continuous Auditing (CA)* dengan harapan menjadi solusi membantu APIP. Tujuan penelitian ini menganalisis, membetuk dan mengembangkan Strategi Implementasi CA di Inspektorat Daerah (ID), dengan metode Research and Development dengan tahapan potensi-masalah, pengumpulan data/informasi, desain produk (strategi) dan validasi desain. Hasil analisis 6M diperoleh informasi bahwa ID mempunyai kelemahan berupa belum idealnya jumlah SDM APIP. Hasil analisis PESTLE diperoleh informasi bahwa ID mempunyai tantangan berupa persepsi buruk terkait stigma *watchdog*. Hasil penilaian kepentingan, faktor Manusia dan Politik yang dinilai paling penting. Hasil perhitungan IFE-EFE posisi ID terletak pada Kuadran 4, direkomendasikan menjalankan strategi bertahan. Hasil analisis SWOT didapat strategi yaitu advokasi, membuat tim, meningkatkan kapabilitas APIP, membuat aplikasi, melakukan konsultasi dan kerja sama, promosi dan menginisiasi peraturan. Hasil analisis risiko didapat pengendalian intern berupa reuiu secara periodik atas pengukuran kinerja, reuiu berjenjang atas menyelaraskan PKPT, dan pemantauan pengendalian. Berdasarkan dokumentasi didapat unsur-unsur yang membentuk CA yaitu Proses, Sistem, Personil dan Lingkungan. Rekomendasi Model CA di ID menggunakan metode ADW dikarenakan banyaknya aplikasi yang diintegrasikan.

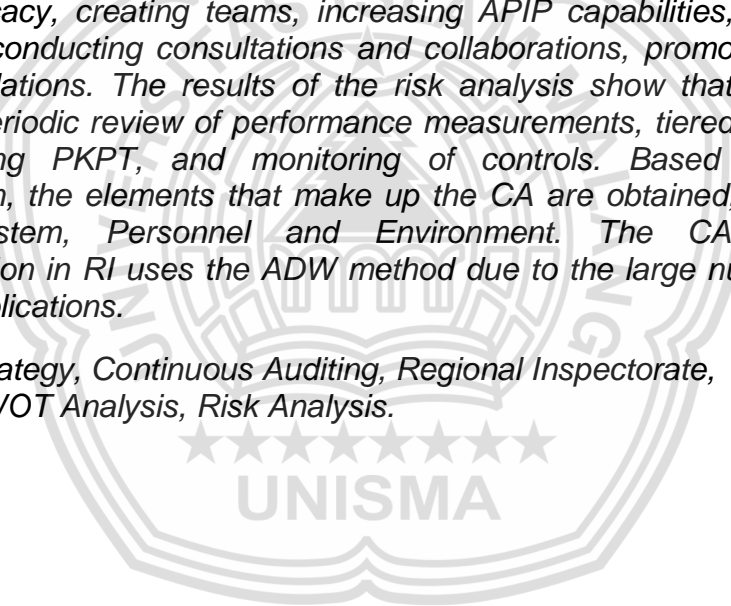
Kata Kunci : Strategi, *Continuous Auditing*, Inspektorat Daerah, Analisis SWOT, Analisis Risiko.



ABSTRACT

This research juxtaposes the problem of the lack of optimal early warning systems on corruption practices with the potential advantages of Continuous Auditing (CA) in the hope of becoming a solution to help APIP. The purpose of this study is to analyze, form and develop a CA Implementation Strategy at the Regional Inspectorate (RI), using the Research and Development method with potential-problem stages, data/information collection, product design (strategy) and design validation. The results of the 6M analysis obtained information that the RI has a weakness in the form of not having an ideal number of APIP human resources. The PESTLE analysis results obtained information that the RI has challenges in the form of bad perceptions related to the watchdog stigma. The results of the interest assessment, Human and Political factors are considered the most important. The results of the IFE-EFE calculation of the RI position are located in Quadrant 4, it is recommended to carry out a defensive strategy. The results of the SWOT analysis obtained strategies, namely advocacy, creating teams, increasing APIP capabilities, making applications, conducting consultations and collaborations, promoting and initiating regulations. The results of the risk analysis show that internal control is a periodic review of performance measurements, tiered reviews of harmonizing PKPT, and monitoring of controls. Based on the documentation, the elements that make up the CA are obtained, namely Process, System, Personnel and Environment. The CA model recommendation in RI uses the ADW method due to the large number of integrated applications.

Keywords: Strategy, Continuous Auditing, Regional Inspectorate, SWOT Analysis, Risk Analysis.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Laporan Kinerja BPKP tahun 2021 mencapai kapabilitas APIP di Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota sebanyak 230 APIP Daerah dengan total 542 atau 42,44% diseluruh Wilayah Indonesia. Dengan fokus di Wilayah Jawa mencapai 52,10% menjadi nomor 2 setelah Wilayah Kalimantan (BPKP 2022), dengan capaian kapabilitas APIP pada level 3, APIP diharapkan mempunyai karakteristik mampu memberikan *early warning* dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anti corruption activities*) (Tuding 2016), tetapi fenomena terjadi pada rentang periode tahun 2019 sampai dengan 2022 terdapat berbagai kasus korupsi di 22 Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Wilayah Jawa dengan menyandang status kapabilitas APIP level 3 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 1. Kasus Korupsi Periode 2019–2022 di wilayah Jawa pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan status APIP level 3

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Media Berita
1.	2019	7	(Azis 2022), (Media 2022d), (Media 2022b), (Purbaya 2020), (Media 2021b), (Wibowo 2022) dan (Putra 2022)
2.	2020	9	(Media 2022d), (Rahmawati 2022), (Rifa'i 2022), (Media 2022c), (Media 2022a), (Cahyani 2022), (Susanto 2022), (Widarsha 2022) dan (Media 2022e),
3.	2021	3	(Putra 2022), (Media 2022f) dan (Liputan6.com 2022)
4.	2022	3	(Putra 2022), dan (Indonesia 2022) (Ramadhan 2022)
Total :		22	

Sumber: Rangkuman berbagai Refrensi dari Media Berita

dari tabel di atas didapat informasi lainnya, yaitu 16 kasus melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri dan 6 kasus melibatkan Kepala Daerah yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Didik dalam BPKP (2018) bahwa kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang marak terjadi belakangan ini memiliki kaitan dengan APIP sebagai pengawas keuangan. APIP yang sebenarnya memiliki kedudukan strategis, namun pada saat ini belum mampu berperan optimal untuk memberikan *early warning* atau rekomendasi-rekomendasi yang solutif yang sifatnya membangun kepada pimpinan organisasi. Hal ini disebabkan oleh kapabilitas dan independensi organisasi yang kurang memadai (BPKP 2018).

Sugiyono (2019) menyatakan penelitian dapat berangkat dari adanya potensi atau masalah. Dalam hal ini peneliti akan menyandingkan keduanya, yaitu permasalahan di atas dengan gejala “kurang optimalnya APIP sebagai *early warning system* terhadap praktik korupsi” dan potensi keunggulan “*Continuous Auditing*” dengan harapan menjadi solusi dalam membantu pelaksanaan tugas APIP menjadi *early warning system* terhadap praktik korupsi, serta sebagai faktor pendorong untuk dikembangkan di Inspektorat Daerah. Berdasarkan hasil penelitian Antonio (2022) menyatakan *Continuous Auditing* dan kebijakan yang mengarah pada efektivitas audit dalam peningkatan pengendalian internal dan kualitas dengan penurunan temuan-temuan yang sangat signifikan. Penurunan Temuan yang signifikan ini disebabkan oleh pemeriksaan *real-time*, pengambilan sampel populasi versus sampel data, dan dengan

peningkatan berkelanjutan parameter *Continuous Auditing*. *Continuous Auditing* sebagai alat atau metode yang andal yang membantu manajemen mencapai tujuannya (Antonio 2022). Berdasar hasil penelitian Dewi (2022) Penerapan *Continuous Auditing and Continuous Monitoring* (CACM) merupakan inovasi dari teknologi informasi yang masih menjadi wacana dan seharusnya sudah diterapkan di seluruh instansi pemerintah guna pelaksanaan audit yang efisien dan efektif serta mendorong komitmen independensi APIP dalam menambah nilai tambah kapasitas dan kapabilitasnya (Dewi 2022). *Continuous Auditing* memiliki banyak keuntungan apabila diterapkan (Zahirah 2022). Untuk Strategi Implementasi *Continuous Auditing* Di Inspektorat Daerah, maka dibutuhkan pengumpulan informasi terkait situasi secara internal dan eksternal.

Informasi situasi internal didapat dengan memanfaatkan informasi permasalahan di Organisasi APIP daerah, berdasarkan informasi 25 Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah yang telah ditransparasi dari total 38 Kabupaten / Kota di Wilayah Jawa Timur dengan periode 2018–2023 dan periode 2021–2026 yang dipandang dengan pendekatan Analisis *Management 6M* (*Man, Money, Machine, Material, Method, dan Market*) dengan hasil tabulasi sebagai berikut : 1) Dari faktor manusia sebanyak 50% Inspektorat Daerah menyatakan belum memadainya kualitas SDM APIP yang dibandingkan dengan banyaknya jenis pengawasan dan kurangnya kuantitas SDM APIP yang dibandingkan dengan jumlah objek pengawasan, 2) Dari faktor mesin sebanyak 24% Inspektorat Daerah menyatakan rendahnya dukungan dan kurang optimalnya pemanfaatan

sarana prasarana pelaksanaan pengawasan 3) Dari faktor anggaran sebanyak 16% Inspektorat Daerah menyatakan anggaran pengawasan yang kurang memadai, tetapi terdapat kebijakan untuk menguatkan anggaran APIP daerah, yaitu anggaran pengawasan 0,5%-1% dari total belanja APBD (PMDN84 2022), 4) Dari faktor material sebanyak 42% Inspektorat Daerah menyatakan kurang memadainya bahan pengawasan yang disebabkan rendahnya maturitas SPIP dan Manajemen Risiko oleh organisasi perangkat daerah sebagai bahan perencanaan, penentuan ruang lingkup dan sasaran pengawasan serta kurangnya transparasinya informasi oleh organisasi perangkat daerah kepada APIP mengenai pengelolaan keuangan dan capaian kinerja, 5) Dari faktor metode sebanyak 18% Inspektorat Daerah menyatakan masih belum efektifnya sistem dan metode pengawasan seperti Pedoman dan pengendalian mutu pengawasan Pemerintahan Daerah, 6) Dari faktor market atau bisa diartikan sasaran kinerja organisasi sebanyak 39% Inspektorat Daerah menyatakan tingginya tuntutan masyarakat atas pemerintah yang *Good Governance and Clean Government*, rendahnya tindaklanjut Pengaduan Masyarakat, rendahnya tindaklanjut temuan hasil pengawasan dan masih adanya temuan berulang. Dan dari temuan lainnya dalam Dokumen Rencana Strategis adalah 37% menyatakan faktor kekuatan, yaitu Komitmen Pimpinan dan Komitmen APIP untuk mewujudkan *Good Governance and Clean Government* dan 100% Inspektorat Daerah belum mempunyai rencana strategis untuk *Continuous Auditing* di Insektorat Daerah.

Informasi situasi eksternal untuk Strategi Implementasi *Continuous Auditing* Di Inspektorat Daerah, berdasarkan informasi penelitian terdahulu dan informasi pendukung lainnya yang terkait *Continuous Auditing* yang dipandang dengan pendekatan Analisis PESTLE (*Political, Economic, Social, Technology, Legal, and Environment*), yaitu: dari faktor politik berdasarkan hasil penelitian Kurniawan (2017) menyatakan kurangnya dukungan implementasi *Continuous Auditing* dari pemerintah. Dari faktor ekonomi berdasarkan hasil penelitian Maulidiastuti (2018) menyatakan *Continuous Auditing* berpengaruh terhadap efektivitas pendeteksian dan pencegahan fraud. Adanya sistem akuntansi yang memadai, menjadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi. Dari faktor sosial berdasar hasil penelitian dalam Kurniawan (2017) menyatakan auditor yakin *Continuous Auditing* tidak dapat menggantikan keberadaan audit tradisional, hasil penelitian Kurniawan (2017) menyatakan implementasi *Continuous Auditing* klien memerlukan dukungan yang kuat baik dari sisi finansial dan sisi yang berkaitan dengan TI (infrastruktur dan keahlian personel), dari sisi tim audit mengungkapkan terbatasnya personel yang menjadi kendala sumber daya. Dan temuan lainnya persepsi klien terhadap auditor dan kurangnya penegakan dari badan pengawas (Tandiono 2022). Dari faktor teknologi berdasar hasil penelitian Kurniawan (2017) menyatakan pada sistem belum kompatibel dan belum integrasi data dan temuan Soedarsono (2019) dan faktor aksesibilitas teknologi yang tidak merata (Tandiono 2022) di sisi lain peningkatannya penerapan *Continuous Monitoring* menghasilkan peningkatan penerapan *Continuous Auditing* (Soedarsono 2019). Dari

faktor Legal secara jelas belum ada peraturan yang mengatur tentang *Continuous Auditing* di Indonesia, tetapi terdapat beberapa peraturan yang bisa sebagai peluang dasar peraturan pemerintah daerah untuk *Continuous Auditing* seperti Satu Data Indonesia (Perpres39 2019), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Perpres95 2018), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (PP60 2008) dan memanfaatkan kekuatan yang melekat, yaitu Pemerintah sebagai fungsi regulating (pengaturan) (Sari 2022). Dari faktor lingkungan berdasarkan hasil penelitian Kurniawan (2017) menyatakan yang kurang kompetitif sehingga perusahaan masih enggan untuk menerapkan *Continuous Auditing* (Kurniawan 2017), hal tersebut juga terjadi di Inspektorat Daerah.

Dari situasi di atas didapat beberapa informasi, yaitu belum ada Strategi Implementasi *Continuous Auditing* Di Inspektorat Daerah dan dari penelitian terdahulu belum ada. Dari informasi tersebut menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian terkait Strategi Implementasi *Continuous Auditing* Di Inspektorat Daerah. Terjadinya kesenjangan faktor teknologi dan faktor manusia di Inspektorat Daerah jika *Continuous Auditing* akan diterapkan, maka teori yang digunakan cenderung "*interventionis*" dalam hal ini pendekatan *Organization Development* (OD) (Uha 2014), berdasarkan hal tersebut peneliti menggunakan metode *Research dan Development* (R&D) (Sugiyono 2019), disebabkan *Organization Development* mempunyai dimensi pemasalahan berupa memerlukan banyak waktu dan jangka panjang (Ranjabar 2020), maka peneliti membatasi penelitian dengan menggunakan metode *Research dan*

Development (R&D) level 1 (Sugiyono 2019), dengan metode tersebut peneliti hanya meneliti Strategi Implementasi *Continuous Auditing* Di Inspektorat Daerah, tetapi tidak dilakukan pengujian efektivitas sebagai upaya peneliti dapat melakukan secara mendalam.

Garis besar usulan ide dan gagasan perubahan untuk pemecahan masalah dengan membuat perencanaan Strategi Implementasi *Continuous Auditing* Di Inspektorat Daerah yang menyatu dan menjadikan bagian integral dengan mengintegrasikan proses bisnis Aplikasi yaitu pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (PMDN70 2019) dan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI 2021). Dikarenakan banyak pengelolaan data di Pemerintahan Daerah menggunakan sistem Aplikasi Internal milik SKPD secara mandiri dan Aplikasi eksternal milik Kementerian / lembaga negara yang digunakan oleh SKPD untuk pengelolaan kegiatan, semua aplikasi tersebut di luar rentang pengawasan APIP Daerah. Kondisi yang diharapkan dalam perubahan adalah untuk mewujudkan *Good Governance* di Pemerintahan Daerah yang salah satu ciri penerapan prinsip-prinsip *good governance* adalah pengelolaan keuangan Daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas (Puspasari 2019). Dalam pengelolaan keuangan daerah sudah dikelola dengan bantuan Aplikasi SIPD yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan, pertanggungjawaban, pengumpulan, pengisian

dan pemeriksaan data berbasis elektronik (PMDN70 2019), tetapi belum adanya Audit Internal yang memberikan *asurans* dan *advis* yang independen dan objektif mengenai kecukupan dan efektivitas tata kelola dan manajemen risiko (IIA 2022) serta evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh APIP atau pihak eksternal pemerintah (PP60 2008) karena penerapan SPIP di lingkungan pemerintahan merupakan suatu wujud komitmen pemerintah untuk membangun *good governance* (Setiawati 2022). Dengan menempatkan ide menyempurnakan pengelolaan aplikasi dengan menambahkan *Continuous Auditing* untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (PP60 2008).

Makna penelitian ini sesuai dengan kutipan “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (QS. Ar.Ra’d Ayat 11) bahwa ayat tersebut dengan dampak fenomena yang akan terjadi dikemudian hari, maka tidak akan ada yang terhindar dari takdir ALLAH SWT terkecuali ada salah satu dari mereka yang merubahnya, bisa jadi dari golongan mereka sendiri, pengamat atau faktor penyebab yang masih mempunyai hubungan (Era.id n.d.) dalam bentuk perencanaan strategi perbaikan sistem untuk menjawab tantangan perubahan dimasa depan karena tidak ada yang pasti di dalam perubahan hanya perubahan itulah yang pasti. Selaras dengan semangat reformasi birokrasi, yaitu akan menjadi pendorong perubahan untuk

membawa Pemerintah Daerah bergeser atau bergerak dari kondisi saat ini menuju ke kondisi yang diharapkan (PermenpanRB 10 2011).

Penelitian ini akan mengambil uji petik pada Inspektorat Daerah Probolinggo dikarenakan Kapabilitas APIP masih level 2 (BPKP 2022) dan ditambah kejadian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di Kabupaten Probolinggo pada Senin 30 Agustus 2021 (Media 2021a), dengan harapan mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan jika akan mengimplementasikan *Continuous Auditing*. Dan uji petik pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai data pembanding dikarenakan Kapabilitas APIP sudah level 3 (BPKP 2022) dan menggali informasi mencapai Kapabilitas APIP dan penerapan e-Audit (Yon 2021) sebagai *best practice*.

1.2. Fokus Penelitian

Dalam hal ini peneliti akan menganalisis *Continuous Auditing* Di Inspektorat Daerah dengan mengumpulkan informasi awal situasi internal dan eksternal di atas, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Apakah unsur-unsur *Continuous Auditing* di Inspektorat Daerah?
- 2) Bagaimana tahapan-tahapan Implementasi *Continuous Auditing* di Inspektorat Daerah?
- 3) Bagaimana Model *Continuous Auditing* di Inspektorat Daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini menganalisis, membetuk dan mengembangkan Strategi Implementasi *Continuous Auditing* di Inspektorat Daerah yang tepat dengan mempertimbangkan situasi internal dan eksternal.

1.4. Manfaat Penelitian

1) Bagi akademisi

Sebagai bahan studi pendahuluan untuk Strategi Implementasi *Continuous Auditing* Di Inspektorat Daerah ke tahap pengembangan selanjutnya, yaitu tahap pengembangan Aplikasi *Continuous Auditing* sebagai Model Hipotetik / Produk Prototipe untuk diuji coba dan sebagai bahan pengembangan sumber daya manusia sebagai pendukungnya, serta tahap eksperimen untuk mengukur efektivitas implementasi *Continuous Auditing* di Inspektorat Daerah,

2) Bagi praktisi

- a) *Stakeholder* di Inspektorat Daerah sebagai bahan naskah akademis untuk dasar penyusunan Peraturan Pemerintahan Daerah tentang *Continuous Auditing* sebagai bentuk Komitmen Kepala Daerah untuk mewujudkan *Good Governance* di Pemerintahan Daerah, dan
- b) Sebagai bahan menyusun Rencana Strategis *Continuous Auditing* di Inspektorat Daerah dengan memanfaatkan informasi situasi internal, situasi eksternal, tahapan strategi, risiko yang akan terjadi dan rekomendasi model, untuk diuji kembali di Inspektorat Daerah saat ini.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian Strategi Implementasi *Continuous Auditing* Di Inspektorat Daerah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis 6M (*Man, Money, Machine, Material, Method, dan Market*) diperoleh informasi bahwa Inspektorat Daerah mempunyai dua kekuatan dan sepuluh kelemahan analisis PESTLE (*Political, Economic, Social, Technology, Legal, and Environment*) diperoleh informasi bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tiga peluang dan tujuh tantangan,
2. Berdasarkan hasil perhitungan IFE (*Internal Factor Evaluation*) dan EFE (*Eksternal Factor Evaluation*) didapat posisi Inspektorat Daerah Probolinggo terletak pada Kuadran ke empat, jadi organisasi mempunyai banyak tantangan jika akan mengimplementasikan *Continuous Auditing*, maka direkomendasikan menjalankan strategi bertahan, dengan melaksanakan pengendalian internal secara periodik atas indikator dan pencapaian kinerja,
3. Berdasarkan hasil analisis SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunity, Threats*) didapat delapan tahapan untuk mengimplementasikan *Continuous Auditing* di Inspektorat Daerah, yaitu melakukan mengadvokasi berkelanjutan kepada *stakeholder*, membuat tim, meningkatkan kapabilitas dan kompetensi APIP (Aparat Pengawas

Intern Pemerintah), konsultasi dan kerjasama *Continuous Auditing*, membuat aplikasi *Continuous Auditing*, mempromosikan keunggulan *Continuous Auditing*, menginisiasi peraturan tentang *Continuous Auditing* dan Pengendalian internal.

4. Berdasarkan hasil analisis Risiko didapat lima kegiatan pengendalian intern, yaitu melakukan kerjasama dengan Pihak Pengembang Aplikasi pembuatan aplikasi dan mengintegrasikan ke Aplikasi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) / auditi, mereviu secara periodik atas indikator dan pengukuran kinerja pada kegiatan advokasi-promosi *Continuous Auditing*, mereviu berjenjang serta antar bidang untuk menyelaraskan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan), Nota kesepahaman kerjasama pengembangan *Continuous Auditing* dan mendampingi penyusunan manajemen risiko di SKPD serta pemantauan pengendalian secara periodik,
5. Berdasarkan hasil kajian pustaka atau dokumentasi beberapa jurnal penelitian didapat unsur-unsur yang membentuk Model *Continuous Auditing* yaitu Proses, Sistem, Personil dan Lingkungan,
6. Rekomendasi Model *Continuous Auditing* di Inspektorat Daerah akan menggunakan metode *Model ADW (Audit Data Warehouse)* dikarenakan banyaknya aplikasi yang digunakan oleh SKPD / Auditi dan Aplikasi milik *stakeholder* eksternal untuk diintegrasikan.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian Strategi Implementasi *Continuous Auditing* Di Inspektorat Daerah yang berhasil mengidentifikasi permasalahan, tantang dan risiko serta keterbatasan penelitian ini, maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

6.2.1. Kepada Peneliti Lain

Penelitian strategi ini dapat digunakan untuk refrensi penelitian lebih lanjut tahap pengembangan Aplikasi *Continuous Auditing* sebagai Model Hipotetik / Produk Prototipe untuk diuji coba serta pengembangan manusia sebagai pendukungnya di Inspektorat Daerah. Tahap eksperimen untuk mengukur efektivitas implementasi *Continuous Auditing* di Inspektorat Daerah, serta mengidentifikasi risiko-risiko yang lebih mendalam terkait Strategi Implementasi *Continuous Auditing* Di Inspektorat Daerah hingga ke dalam risiko tingkat operasional.

6.2.2. Saran bagi pengelola organisasi

Sebagai momentum perubahan metode pengawasan dan pembinaan berbasis teknologi yang lebih efektif dengan bentuk inovasi *Continuous Auditing* di Inspektorat, maka disarankan bagi pengelola organisasi sebagai berikut:

1. Untuk kelemahan “kurang idealnya jumlah APIP” adalah sebuah fenomena, tetapi akar permasalahannya kurangnya pemanfaatan teknologi untuk membantu APIP dalam melaksanakan pengawasan dan

pembinaan belum optimal dilaksanakan, maka untuk hal tersebut disarankan pada pengelola organisasi untuk memanfaatkan pesatnya berbagai macam teknologi untuk menunjang pelaksanaan, mulai dari penyesuaian perencanaan dengan pengelolaan gap kompetensi APIP, anggaran, sarana prasarana serta metode yang tepat dengan manajemen berbasis teknologi yang mengelola mulai hulu hingga hilir pengawasan dan pembinaan,

2. Untuk tantangan “persepsi terkait stigma *Watchdog*” maka disarankan lebih melakukan pendekatan komunikasi dan koordinasi yang intens dan menjaga kepercayaan auditi, berupa advokasi, promosi dan sosialisasi terkait pesan APIP, Kode Etik, Standar Mutu dan *Continuous Auditing*, dan
3. Penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai salah satu referensi bahan pengambilan kebijakan dan bahan naskah akademis untuk dasar penyusunan Peraturan Pemerintahan Daerah tentang *Continuous Auditing* sebagai bentuk Komitmen Kepala Daerah untuk mewujudkan *Good Governance* di Pemerintah Daerah, serta Rencana Strategi terkait *Continuous Auditing* di Inspektorat Daerah sebagai referensi bahan penyusunan *cascading* dan *cross cutting* program dengan *Continuous Auditing* agar lebih terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Gregorius Rudy. 2022. "The Effectiveness of Continuous Auditing Implementation: Developing Automated Audit Systems for Fraud and Error Detections." *Utsaha Journal of Entrepreneurship*, August, 82–107.
- Arsid, Arsid, Ida Widianingsih, Heru Nurasa, and Entang Adhy Muhtar. 2019. 'Implementasi master strategi dalam menciptakan nilai publik pada PDAM TKR Kabupaten Tangerang'. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 4 (1): 45–62. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v4i1.2411>.
- Astuti, Dewi Saptantinah Puji. 2006. "Penerapan Audit Modern Di Era Teknologi Informasi" 5 (1).
- Azis, Nur. 2022. "Tersandung Korupsi, Kadis PUTR Sumedang Dijebloskan ke Bui." *detikjabar*. September 19, 2022. <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6300777/tersandung-korupsi-kadis-putr-sumedang-dijebloskan-ke-bui>.
- Bambang Nurcahya, Said, Dematria Pringgabayu, Nana Sujana, and Andri Nurdiansah. 2023. "Analisis Desain Eksibisi Museum Digital Holtikultura Di Kabupaten Purwakarta." *Jurnal Teknologi Komputer dan Informatika* 1 (2): 63–77. <https://doi.org/10.59820/tekomin.v1i2.45>.
- Bastian, Indra. 2014. "Audit Sektor Publik: Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintah."
- Beatrix, Maria, and Agustinus Purna Irawan. 2022. "PESTLE Analysis for Indonesia's MSME during Covid-19;" In . Jakarta, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.311>.
- Bozkuş Kahyaoğlu, Sezer, Rasim Sarıkaya, and Bahadır Topal. 2020. "Kamu Sektörü İç Denetiminde Stratejik Bir Araç Olarak Sürekli Denetim: Türkiye Örneği." *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi*, April, 208–25. <https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.670261>.
- BPKP. 2018. "Situs Resmi BPKP-RI." April 3, 2018. <https://www.bpkp.go.id/berita/read/19719/6220/Peningkatan-Kapabilitas-APIP-Menuju-Level-3>.
- . 2022. "Laporan Kinerja Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Tahun 2021." <https://www.bpkp.go.id/konten/3863/Laporan-Kinerja-BPKP.bpkp>.

- Cahyani, Mita. 2022. "Korupsi Ratusan Juta, Mantan Camat Purbalingga Divonis Empat Tahun Penjara | BPK Perwakilan Propinsi JAWA TENGAH." March 2, 2022. <https://jateng.bpk.go.id/korupsi-ratusan-juta-mantan-camat-purbalingga-divonis-empat-tahun-penjara/>.
- Carvalho, Cleginaldo, and Rosane Antunes. 2021. "Risk Management Applied to Organizational Strategy -A Case Study Applied to a Continuous Billet Forming Machine." *International Journal of Advanced Engineering Research and Science* 8 (October): 2456–1908. <https://doi.org/10.22161/ijaers.810.34>.
- Chan, David Y., Victoria Chiu, and Miklos A. Vasarhelyi, eds. 2018. *Continuous Auditing: Theory and Application*. First edition. Rutgers Accounting Information Systems Series. Bingley, UK: Emerald Publishing.
- Dahruji, Dahruji, Mashudi Mashudi, and Bustomi Arisandi. 2022. "SWOT Analysis of Bukit Jaddih for Halal Tourism Village Destination in Bangkalan Regency." *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 8 (1): 130–48. <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v8i1.5241>.
- Dewi, Herlin Angela. 2022. "Independensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Guna Pelaksanaan Good Governance Berbasis CACM Di Lingkungan Pemerintah Daerah." *Arena Hukum* 15 (2): 399–422. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.9>.
- Era.id. n.d. "Kandungan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ra'd Ayat 11 'Allah Tidak Akan Mengubah Nasib Suatu Kaum Kecuali Mereka Sendiri yang Mengubahnya.'" ERA.ID. Accessed August 13, 2022. <https://era.id/ide/53201/kandungan-dalam-al-qur-an-surat-ar-ra-d-ayat-11-allah-tidak-akan-mengubah-nasib-suatu-kaum-kecuali-mereka-sendiri-yang-mengubahnya>.
- Fakhurozi, Ahmad, Tatbita Titin Suhariyanto, and Muhammad Faishal. 2021. "Analysis of Environmental Impact and Municipal Waste Management Strategy: A Case of the Piyungan Landfill, Yogyakarta, Indonesia." *Jurnal Optimasi Sistem Industri* 20 (1): 61–71. <https://doi.org/10.25077/josi.v20.n1.p61-71.2021>.
- Hiererra, Siti Elda, and Mario Octaviano Ignatius Sarayar. 2014. "Continuous Audit: Implementasi dan Pengendalian Berbasis Teknologi Informasi dalam Menjalankan Fungsi Audit yang lebih Efektif dan Efisien." *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* 5 (2): 763. <https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2238>.
- Indonesia, C. N. N. 2022. "Korupsi Bupati Bangkalan, Ra Latif Diduga Terima Suap Rp5,3 Miliar." *nasional*. 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221208063256-12->

884380/korupsi-bupati-bangkalan-ra-latif-diduga-terima-suap-rp53-miliar.

- KPMG. 2008. "Continuous Auditing and Continuous Monitoring: Transforming Internal Audit and Management Monitoring to Create Value." <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/kz/pdf/cacm-brochure.pdf>.
- Kurniawan, Taufan Adi. 2017. Continuous Audit: Tantangan Dalam Implementasi. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 152–159. <https://doi.org/10.26460/ad.v1i2.1567>."
- Lestari, Ika Dian, and M Iqbal Akbar. 2022. "Manajemen Risiko Umkm Jumputan Di Masa Pandemi (Studi Kasus Sanggar Jumputan Maharani Kampung Tahunan Yogyakarta)" 5: 7.
- Liputan6.com. 2022. "Tersangka Korupsi Proyek Jalan Dinas PU CKPP Banyuwangi Segera Ditetapkan." liputan6.com. September 15, 2022. <https://surabaya.liputan6.com/read/5069896/tersangka-korupsi-proyek-jalan-dinas-pu-ckpp-banyuwangi-segera-ditetapkan>.
- Maulidiastuti, Tri, and Muhammad Yusuf. 2018. "Analisis Peran Akuntansi Forensik, Data Mining, Continuous Auditing, Terhadap Pendeteksian Fraud Serta Dampaknya Pada Pencegahan Fraud" 3 (2): 18.
- Media, Kompas Cyber. 2021a. "Kronologi OTT terhadap Bupati Probolinggo dan Suaminya Terkait Jual Beli Jabatan." KOMPAS.com. August 30, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/31/05561831/kronologi-ott-terhadap-bupati-probolinggo-dan-suaminya-terkait-jual-beli>.
- . 2021b. "Tersangka Kasus Korupsi Pembangunan GOR di Kulon Progo Menang Praperadilan Halaman all." KOMPAS.com. November 30, 2021. <https://regional.kompas.com/read/2021/11/30/204154678/tersangka-kasus-korupsi-pembangunan-gor-di-kulon-progo-menang-praperadilan>.
- . 2022a. "Kepala Disparpora Kota Serang Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Revitalisasi IKM Rp 5,3 Miliar." KOMPAS.com. May 18, 2022. <https://regional.kompas.com/read/2022/05/18/192639878/kepala-disparpora-kota-serang-jadi-tersangka-dugaan-korupsi-revitalisasi>.
- . 2022b. "Mantan Kadis LH Cilegon Jadi Tersangka Korupsi, Wali Kota: Beliau Orang Baik." KOMPAS.com. June 2, 2022. <https://regional.kompas.com/read/2022/06/02/170911178/mantan-kadis-lh-cilegon-jadi-tersangka-korupsi-wali-kota-beliau-orang-baik>.

- . 2022c. “Mantan Kepala Sekolah SMPN 17 Tangsel Jadi Tersangka Kasus Korupsi Dana PIP.” KOMPAS.com. July 11, 2022. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/07/11/21020521/mantan-kepala-sekolah-smpn-17-tangsel-jadi-tersangka-kasus-korupsi-dana>.
- . 2022d. “Kejari Kota Bogor Serahkan Rp 900 Juta Lebih Uang Kasus Korupsi Dana BOS Ke Pemprov Jabar Halaman all.” KOMPAS.com. September 1, 2022. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/01/21122481/kejari-kota-bogor-serahkan-rp-900-juta-lebih-uang-kasus-korupsi-dana-bos>.
- . 2022e. “Kasus Dugaan Korupsi Pisang Mas Kirana, Kejari Lumajang Geledah Kantor Dinas Pertanian.” KOMPAS.com. October 12, 2022. <https://surabaya.kompas.com/read/2022/10/12/170823678/kasus-dugaan-korupsi-pisang-mas-kirana-kejari-lumajang-geledah-kantor-dinas>.
- . 2022f. “Eks Pejabat Dinsos Lebak Banten Jadi Tersangka Korupsi Dana Bansos.” KOMPAS.com. December 9, 2022. <https://regional.kompas.com/read/2022/12/09/180229478/eks-pejabat-dinsos-lebak-banten-jadi-tersangka-korupsi-dana-bansos>.
- Mouillot, Philippe, and Rémy Park. 2023. “Assessing Market Rigidity: Leave It to Physicians.,” April.
- Nisya, Nurul Isnainin. 2022. “Analisa Desain Organisasi Pada Kedai Kopi Ben’Enak (BE) Menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif.” *Jurnal Dunia Bisnis* 2 (4). <http://duniabisnis.org/index.php/duniabisnis/article/view/184>.
- Pardiman. Suja’i, Ahmad Yusuf Imam. Nurhajati. Sunaryo, Hadi. Hidayati, Nur. 2019, " Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis." Malang : Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Islam Malang.
- Perkasa, RM Gerry Devindra, and Rakhdiny Sustaningrum. 2022. “Analisis Potensi Bisnis Snack Ala Korea,” 15.
- Perpres39. 2019. “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia.” <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/108813/perpres-no-39-tahun-2019>.
- PermenpanRB 10. 2011. “Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokasi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan.”

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/132858/permen-pan-rb-no-10-tahun-2011>.

Perpres95. 2018. "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik."
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/96913/perpres-no-95-tahun-2018>.

PMD107. 2017. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota."
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111467/permendagri-no-107-tahun-2017>.

PP 60. 2008. "Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah." Pemerintah Republik Indonesia.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4876>.

PP72. 2019. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor T2tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah."
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122033/pp-no-72-tahun-2019>.

PPANRB07. 2022. "Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi."
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/202233/permen-pan-rb-no-7-tahun-2022>.

Purbaya, Angling Adhitya. 2020. "Bupati Kudus Tamzil Masuk Bui Lagi: Dulu Korupsi, Kini Terima Suap." detiknews. April 7, 2020.
<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4967776/bupati-kudus-tamzil-masuk-bui-lagi-dulu-korupsi-kini-terima-suap>.

Putra, I. Putu Wira Eka. 2022. "Catatan Berita – Kejari Tangerang Usut Kasus Korupsi Dana BOS, 100 Kepsek Diperiksa | BPK Perwakilan Provinsi Banten." July 4, 2022. <https://banten.bpk.go.id/catatan-berita-kejari-tangerang-usut-kasus-korupsi-dana-bos-100-kepsek-diperiksa/>.

Putra, Wisma. 2022. "Tok! Ade Yasin Divonis 4 Tahun Penjara." detikjabar. 2022. <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6308340/tok-ade-yasin-divonis-4-tahun-penjara>.

- Putra, Yobby Lonard Antama. 2022. "Kasus Korupsi Anggaran Dana PIP Diskominfo Kediri Munculkan Dua Tersangka Baru - TIMES Indonesia." September 23, 2022. <https://www.timesindonesia.co.id/hukum-kriminal/429629/kasus-korupsi-anggaran-dana-pip-diskominfo-kediri-munculkan-dua-tersangka-baru>.
- Rahmawati, Dwi. 2022. "Eks Bendahara Damkar Depok Didakwa Kasus Korupsi Rp 1,2 M." detiknews. 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6313189/eks-bendahara-damkar-depok-didakwa-kasus-korupsi-rp-12-m>.
- Ramadhan, Dony Indra. 2022. "Walkot Bekasi Nonaktif Rahmat Effendi Didakwa Terima Suap Rp 10 M." detikjabar. 2022. <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6101957/walkot-bekasi-nonaktif-rahmat-effendi-didakwa-terima-suap-rp-10-m>.
- Rifa'i, Bahtiar. 2022. "Eks Kadis di Kabupaten Serang Jadi Tersangka Korupsi Bantuan COVID-19." detiknews. 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6190096/eks-kadis-di-kabupaten-serang-jadi-tersangka-korupsi-bantuan-covid-19>.
- Riyanto, Slamet. Azis, Muh Nur Luthfi. Putera, Rahma Andi. 2021, "Analisis SWOT sebagai Penyusun Strategi Organisasi.", Madiun : Bintang Pustaka Madani.
- Sari, Hikma Dian. 2022. "Asas dan Fungsi Pemerintahan: Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta Fungsi Pemerintahan dalam Pelayanan Publik," 25.
- Satito, Bayu P. H. 2023. "Pestle Analysis: Pengertian, Tujuan, Faktor, Kelebihan, Kekurangannya." fortuneidn.com. January 23, 2023. <https://www.fortuneidn.com/business/bayu/mengenal-pestle-analysis-tujuan-faktor-kelebihan-dan-kekurangannya>.
- Saudi, Mohd Haizam, and Et Al. 2021. "Risk Management Analysis for ICT Strategic Plan by Using PESTLE: A Case Study." Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 12 (8): 1732–37. <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i8.3245>.
- Setyawan, Eka C. 2022. "MEWUJUDKAN CONTINUOUS AUDITING DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL."
- Setiawati, Arini Dian. 2022. "Akuntabilitas Birokrasi Pejabat Pemerintahan Dalam Rangka Tercapainya Prinsip-Prinsip Good Governance," 18.
- Soedarsono, Slamet, Sri Mulyani, Hiro Tugiman, and Didik Suhardi. 2019. "Information Quality and Management Support as Key Factors in the Applications of Continuous Auditing and Continuous Monitoring: An

Empirical Study in the Government Sector of Indonesia.”
Contemporary Economics 13 (3): 335–51.

Sugiyono. 2019. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.",
Bandung : Alfabeta, CV.

Susanto, Eko. 2022. "Korupsi BBM Truk Sampah, 2 Pejabat DLH Magelang
Divonis 15 Bulan Bui." detikjateng. Agu 2022.
<https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6214991/korupsi-bbm-truk-sampah-2-pejabat-dlh-magelang-divonis-15-bulan-bui>.

Tandiono, Rosaline, and Theodore Yana Federicco. 2022. "Analysis of a
Country Readiness in Adopting Continuous Auditing Technology -
The Case of Indonesia." In 2022 International Conference on
Information Management and Technology (ICIMTech), 51–56.
<https://doi.org/10.1109/ICIMTech55957.2022.9915170>.

Tuding, Daniel Saleppang. 2016. "Kapasitas Aparat Inspektorat dalam
Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo (Kajian
terhadap Kompetensi Aparat Inspektorat di Kabupaten Sidoarjo)."
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik 2 (1): 11–18.
<https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.01.2>.

UU23. 2014. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah."
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.

Uha, Ismail Nawawi. 2014, "Manajemen Perubahan : Teori dan Aplikasi
pada Organisasi Publik dan Bisnis.", Bogor : Ghalia Indonesia.

Wibowo, Eko Ari. 2022. "Kasus Suap Wali Kota Yogyakarta, Penyuap
Haryadi Suyuti Divonis 3 Tahun Penjara." Tempo. November 1,
2022. <https://nasional.tempo.co/read/1651596/kasus-suap-wali-kota-yogyakarta-penyuap-haryadi-suyuti-divonis-3-tahun-penjara>.

Widarsha, Chuk S. 2022. "Kejari Tahan Kepala Bakesbangpol Bondowoso
karena Kasus Korupsi Dana KUBE." detikjatim. Okt 2022.
<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6333991/kejari-tahan-kepala-bakesbangpol-bondowoso-karena-kasus-korupsi-dana-kube>.

Yon. 2021. "WEB | Inspektorat Banyuwangi." October 11, 2021.
<https://inspektorat.banyuwangikab.go.id/content/Berita/detail/pemkot-malang-replikasi-aplikasi-e-audit-pemkab-banyuwangi-09-2022>.

Zahirah, Faranisa Rahma, Fransisca Melenia, and Adhinda Rachma Aminy.
2022. "Continuous Audit: Penerapan Dan Pengendalian

Pelaksanaan Fungsi Audit Berbasis Teknologi Informasi.” Balance: Jurnal Akuntansi, Auditing dan Keuangan 18 (2): 200–216. <https://doi.org/10.25170/balance.v18i2.3136>.

